

PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP KONSTITUEN

Marita Putri Fitria

14040254053 (Prodi S1-PPKn, FISH, UNESA) maritafitria1603@gmail.com

Maya Mustika Kartika Sari

0014057403 (Prodi S1-PPKn, FISH, UNESA) mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dalam pendidikan politik terhadap konstituen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian ini adalah lima anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini adalah pandangan anggota dewan tentang pendidikan politik yaitu pendidikan politik merupakan salah satu tanggung jawab anggota dewan dalam mengimplementasikan fungsi partai politik, pendidikan politik diberikan untuk menciptakan citra politik yang baik, memberikan pemahaman secara konkret tentang politik, memberikan pemahaman kepada konstituen dalam menyelesaikan permasalahan demi terwujudnya kebaikan bersama, dan untuk memberikan pemahaman kepada konstituen tentang fungsi dan tugas DPRD. Aktivitas yang dilakukan oleh anggota dewan dalam memberikan pendidikan politik terhadap konstituen di daerah pemilihan adalah *hearing* dengan konstituen, pengkajian, workshop sosialisasi Peraturan Daerah, seminar, dan pelatihan kegiatan politik. Materi pendidikan politik yang diberikan anggota dewan kepada konstituen adalah sosialisasi pemilihan Gubernur Jawa Timur, fungsi partai politik, esensi politik, empat konsensus kebangsaan, nasionalisme, upaya mewujudkan kebaikan bersama, pentingnya aspirasi politik, dan tugas pokok dan fungsi DPRD. Metode yang digunakan oleh anggota dewan dalam memberikan pendidikan politik kepada konstituen adalah metode pembelajaran kelompok. Teknik yang digunakan dalam memberikan pendidikan politik terhadap konstituen adalah ceramah, tanya jawab, dan berdiskusi. Kendala dalam memberikan pendidikan politik adalah pemahaman tentang politik masing-masing konstituen berbeda, tidak semua konstituen aktif dalam melaksanakan diskusi, dan dalam memberikan pendidikan politik pernah terjadi penolakan.

Kata Kunci : Peran, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Pendidikan Politik, Konstituen

Abstract

This study aims to describe the role of East Java Provincial Legislative Council (DPRD) members in political education against constituents. This research uses qualitative approach with descriptive method. The subject of this research is five East Java Provincial Legislative Council members. Data collection techniques are observation techniques, in-depth interview, and documentation. Data analysis techniques in this research are data reduction, data display, and data verification. In this research, two kinds of triangulation such as technique triangulation and source triangulation were used to test the data validity. The result of the study are East Java Provincial Legislative Council members' views about political education is one of the responsibilities of a council member in implementing the function of political parties, political education is given to create a good political image, giving concrete understanding of politics, providing understanding to constituents in problems solving to realize common good, and to provide understanding about functions and duties of the Regional People's Representative Assembly to constituents. Activities that have been done by council members to provide political education to constituents in electoral districts are hearing with constituents, recitals, workshop on socialization of regional regulations, seminars, and political activities training. The political education materials that provided by council members to the constituents are the socializations of the election of East Java governor, the functions of political parties, the political essence, the four national consensus, efforts to realize the common good, nationalism, and the importance of political aspirations, the main tasks and functions of DPRD. The method which used by council members in providing political education to constituents is group learning method. The techniques which used in providing political education to constituents are lectures, ask and reply method, and discussion. The obstacles in providing political education are the understanding about politics of each constituents different, not all constituents are active on discussions, in providing political education ever happen refutation.

Keywords: Role, East Java Provincial DPRD Members, Political Education, Constituents

PENDAHULUAN

Kesadaran politik penting dimiliki oleh setiap warga negara mengingat begitu beratnya beban tugas yang dipikul oleh penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan guna mencapai tujuan negara sehingga sudah seharusnya warga negara menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Akan tetapi, kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kesadaran politik dan bahkan mereka tidak tertarik terhadap politik.

Hasil survei Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) terhadap 1.700 responden berusia 17 tahun atau sudah menikah yang dilaksanakan pada 25 Juni 2012 sampai dengan 10 Juli 2012 tentang sikap politik rakyat mengungkapkan bahwa hanya sebanyak 23% responden yang mengaku tertarik terhadap politik, sebanyak 30% responden mengaku tidak tertarik pada politik, sebanyak 20% responden mengaku mendiskusikan soal politik, dan sisanya mengaku tidak pernah membahas maupun mendiskusikan masalah politik (sumber: www.lipi.go.id, diakses pada 2 Desember 2017).

Apabila melihat data di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat cenderung apatis dalam dunia perpolitikan. Apatisme merupakan suatu sikap dimana masyarakat tidak memiliki rasa simpati maupun antusias terhadap perkembangan politik. Burhanudin Muhtadi (2013) selaku Direktur Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa munculnya sikap apatisisme pada masyarakat sebenarnya diakibatkan karena buruknya kinerja lembaga politik di Indonesia. Dalam hasil survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia tentang "Internet, Apatisme, dan Aliansi Politik" pada 19-27 Juni tahun 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 67% responden mengaku tidak tertarik dengan segala hal yang berkaitan dengan politik. Selain itu, kepercayaan masyarakat pada institusi politik juga buruk. Dari 58% responden menyatakan bahwa mereka tidak percaya partai politik, disusul dengan responden yang tidak percaya terhadap para politisi, menteri-menteri, DPR, dan Presiden (sumber : www.merdeka.com, diakses pada 2 Desember 2017).

Kepercayaan masyarakat terhadap politik juga semakin menurun karena masyarakat mengikuti berita-berita politik di media massa maupun media online. Berdasarkan survei tersebut juga didapatkan hasil bahwa informasi yang telah diperoleh masyarakat juga berpengaruh terhadap sikap apatisisme masyarakat terhadap politik. Sebanyak 72% responden menyatakan bahwa politisi cenderung hanya berbicara tentang kebaikan diri mereka sendiri, masyarakat pesimis bahwa politisi akan memenuhi janji politiknya, dan menuding

politisi sebagai sekumpulan orang yang mengejar keuntungan bagi diri mereka sendiri. Dari survei tersebut juga didapatkan hasil bahwa semakin sering masyarakat mengakses internet maka semakin rendah pula kepercayaan masyarakat pada politik dan semakin jelek pula pandangan masyarakat terhadap politisi (sumber : www.merdeka.com, diakses pada 2 Desember 2017).

Hal tersebut cukup memprihatinkan dimana sebagai warga negara seharusnya memiliki suatu kesadaran akan hak dan kewajibannya terhadap negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam hal politik. Tidak hanya itu, setiap warga negara juga harus ikut serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara.

Salah satu cara dalam menumbuhkan kesadaran politik pada masyarakat adalah dengan dilaksanakannya pendidikan politik. Pada dasarnya, pendidikan politik perlu ditanamkan pada seluruh masyarakat dalam rangka membangun pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai universal demokrasi. Dengan begitu, masyarakat akan menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 100 orang anggota dewan berasal dari berbagai latar belakang partai yang berbeda yang mewakili dari daerah pemilihan Jawa Timur I sampai dengan Jawa Timur XI dan terbagi dalam 9 fraksi (sumber: www.wikipedia.org, diakses pada 4 Desember 2017).

Para anggota dewan yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Timur merupakan orang-orang yang seharusnya berpartisipasi dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat luas setidaknya pada daerah pemilihan yang mereka wakili. Peran anggota DPRD dalam melaksanakan pendidikan politik tidak hanya dilaksanakan saat momentum terjadinya pemilihan umum saja akan tetapi pendidikan politik harus dilaksanakan secara terus menerus atau berkesinambungan dengan tujuan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahaman mereka terkait sistem politik yang selalu mengalami perkembangan. Karena tujuan pendidikan politik pada dasarnya adalah menjadikan warga negara sadar akan hak dan kewajiban serta tanggungjawab yang dilandasi oleh nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang "Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dalam Pendidikan Politik terhadap Konstituen".

Menurut Kartono (1996:64), pendidikan politik adalah suatu upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu-individu yang mampu menjadi partisipan yang bertanggungjawab

secara etis maupun moral dalam mencapai suatu tujuan politik. Kartono (1996) juga menambahkan bahwa dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Serta bahwa dengan adanya pendidikan politik pada setiap individu tidak hanya sekedar tahu saja akan tetapi juga lebih jauh dapat menjad seorang warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggungjawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik.

Menurut Soekanto (2012:212) peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang yang memiliki suatu status atau kedudukan dan seseorang itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut Cohen (2009:76) mengungkapkan bahwa peran adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu.

Menurut Surbakti (2007:144), kesadaran politik adalah kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sedangkan Budiarmo (1985:22) menyatakan bahwa tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga negara menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. Dalam kedudukannya sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah maka memiliki tanggungjawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat. UUDNRI Tahun 1945 pada pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (3) dijelaskan bahwa pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori andragogi yang dikemukakan oleh Malcom Knowles. Andragogi berasal dari bahasa Yunani yaitu *andros* yang berarti orang dewasa dan *agogos* yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi, andragogi dirumuskan sebagai suatu ilmu atau seni dalam membantu orang dewasa belajar (Arif, 1990:1). Teori andragogi sendiri juga dikenal dengan teori belajar orang

dewasa. Menurut Knowles (Arif, 1990:2) terdapat empat asumsi utama dalam teori andragogi yaitu konsep diri, pengalaman, kesiapan untuk belajar, dan orientasi terhadap belajar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Arikunto (2013:3) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lainnya yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam laporan penelitian. Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif mengenai peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam pendidikan politik terhadap konstituennya.

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah 100 orang. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*. Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga, dan juga ketelitian dalam menganalisis data maka dalam penelitian ini ditentukan 5 informan dengan kriteria pemilihan informan yaitu anggota dewan yang melaksanakan pendidikan politik, bersedia untuk memberikan informasi secara lengkap dan akurat mengenai pendidikan politik yang dilakukan, berasal dari partai politik yang berbeda, berasal dari komisi yang berbeda, dan berasal dari daerah pemilihan yang berbeda. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Nama Anggota Dewan	Partai Politik	Komisi	Dapil
1.	H. Muzammil Syafii, S.H., M.Si.	Nasdem	A	2
2.	Pranaya Yudha Mahardhika, S.P., M.I.B.	Golkar	B	3
3.	Dr. H. M. Noer Soetjipto, S.P., S.E., M.M.	Gerindra	B	7
4.	Agatha Retnosari, S.T.	PDIP	E	1
5.	Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H.	PAN	D	6

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara mendalam, dan teknik dokumentasi. Pertama, teknik observasi. Dalam

penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati gejala-gejala atau tingkah laku aktual anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Kedua, teknik wawancara mendalam (*in depth interview*). Menurut Arikunto (2013:198), wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam berupa wawancara semi terstruktur. Dalam rangka pengumpulan data maka peneliti melakukan wawancara mendalam secara terstruktur maupun tidak terstruktur untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau informasi mengenai pandangan, aktivitas, materi, metode, teknik, dan kendala anggota dewan dalam memberikan pendidikan politik terhadap konstituennya.

Ketiga, teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen, surat, dan lain-lain (Arikunto, 2013:201). Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mencari data melalui foto, bagan, catatan, maupun arsip-arsip lain yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan pendidikan politik.

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono 2015:91) yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Moleong (2012:326) mengungkapkan bahwa agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan konsisten maka diperlukan pengecekan data apakah data yang disajikan valid atau tidak, maka diperlukan teknik keabsahan/kevalidan data. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini maka digunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2015:330). Dalam penelitian ini, digunakan dua macam triangulasi yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Anggota Dewan tentang Pendidikan Politik

Sebagai seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, para wakil rakyat memiliki suatu pandangan terkait dengan pendidikan politik. Berikut ini merupakan tabel tentang pandangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur terkait pelaksanaan pendidikan politik

terhadap konstituen di daerah pemilihan masing-masing yaitu :

Tabel 2. Pandangan Anggota Dewan tentang Pendidikan Politik

No.	Pandangan Anggota Dewan
1.	Pendidikan politik merupakan salah satu tanggungjawab anggota dewan
2.	Pendidikan politik diberikan untuk menciptakan citra politik yang baik di masyarakat
3.	Pendidikan politik penting dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman secara konkret tentang politik
4.	Pendidikan politik bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada konstituen dalam menyelesaikan permasalahan
5.	Pendidikan politik bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang fungsi dan tugas DPRD

Pertama, pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap konstituen di daerah pemilihan anggota dewan masing-masing merupakan salah satu bentuk tanggungjawab seorang wakil rakyat yang juga merupakan anggota dari partai politik dan sudah seharusnya ikut serta mengimplementasikan salah satu fungsi partai politik yaitu memberikan pendidikan politik sehingga dapat mencerdaskan konstituen di daerah pemilihan.

Pendapat tersebut di dukung oleh pernyataan dari H. Muzammil Syafii, S.H., M.Si. selaku anggota Komisi A dari Partai Nasdem yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 2 yang mengatakan bahwa :

“Pendidikan politik dilakukan dengan tujuan untuk menjalankan salah satu fungsi dari partai politik yaitu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Nah, ketika partai politik itu, atau orang-orang yang bergerak dibidang politik ketika tidak memberikan pendidikan politik maka ia tidak menjalankan fungsinya dengan semestinya. Nah disamping kita juga untuk mencerdaskan masyarakat.” (Wawancara tanggal 29 Maret 2018)

Kedua, pendidikan politik diberikan untuk menciptakan citra politik yang baik di masyarakat. Pendidikan politik merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat karena pada kenyataannya, politik merupakan suatu dunia yang bersentuhan dengan segala aspek kehidupan masyarakat yang sifatnya menyentuh dan mengikat. Sehingga citra politik yang baik harus bisa diciptakan melalui pendidikan politik.

Pendidikan politik diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai esensi politik yang sebenarnya karena pada kenyataannya masyarakat banyak yang tidak tertarik dengan politik akan tetapi tertarik dengan intrik politik yang berkembang di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga

melalui pendidikan politik akan membangun citra politik yang baik bagi masyarakat sehingga nantinya masyarakat tahu esensi dari politik yang sesungguhnya.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Basuki Babussalam, S.H., M.H. selaku anggota komisi D yang berasal dari partai PAN terkait dengan pendidikan politik menyatakan bahwa :

“Sebenarnya dalam konstruksi politik, politik itu sebuah bidang atau sebuah dunia yang bersentuhan dengan masyarakat. Politik itu menyentuh dan mengikat masyarakat. Maka sebuah pendidikan politik merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan yang menjadi sebuah kebutuhan hakiki. Bahkan bicara soal fungsi partai politik sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik agar kehidupan politik kebangsaan nasional berjalan dengan baik sehingga semua warga negara memiliki pemahaman tentang esensi, fungsi dari keberadaan politik itu sendiri.” (Wawancara tanggal 5 April 2018)

Pendapat tersebut juga didukung oleh Agatha Retnosari, S.T. selaku anggota komisi E yang berasal dari PDIP yang mengatakan bahwa :

“Pendidikan politik kalau menurut saya penting karena kita tahu bahwa masyarakat kita banyak yang tidak tertarik dengan politik akan tetapi lebih tertarik dengan intrik politiknya daripada esensi dari politiknya, tujuannya apa berpolitik, apa gunanya kamu memilih, dan lain sebagainya. Maka dari itu penting sekali menurut saya pendidikan politik diberikan kepada masyarakat agar mereka tahu esensi politik yang sebenarnya, gitu.” (Wawancara tanggal 2 April 2018)

Ketiga, pendidikan politik penting dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman secara konkret tentang politik sehingga dapat menumbuhkan kesadaran politik. Pendidikan politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memahamkan konstituen atau masyarakat terkait dengan haknya sebagai warga negara, kewajibannya sebagai warga negara, dan tanggungjawabnya sebagai seorang warga negara. Selain itu, pendidikan politik sangat penting dilakukan oleh anggota dewan terhadap konstituennya agar memberikan pemahaman secara konkret mengenai politik. Pendidikan politik yang dilakukan harus memiliki kontribusi dalam kehidupan masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan masyarakat mau terlibat dalam kegiatan politik.

Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Agatha Retnosari, S.T. yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 1 terkait dengan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Sangat penting sekali mbak. Agar masyarakat tahu tentang apa itu politik, bagaimana politik, dan sebagainya. Kan di kita ada jadwal reses ya nah saya sering ke sekolah-sekolah atau ke kampus dengan tujuan memberikan pendidikan politik. Misalnya apa sih hak sebagai warga negara, apa sih tanggung jawabmu sebagai warga negara, kemudian apa hak memilih itu, kemudian apa untungnya kalau kamu memilih, apa ruginya jika kamu tidak memilih. Belum lagi *money politic* nya ya.” (Wawancara tanggal 2 April 2018)

Pendapat tersebut juga didukung dengan pernyataan H. Muzammil Syafii, S.H., M.Si. selaku anggota komisi A yang berasal dari partai Nasdem menyatakan bahwa :

“Pendidikan politik itu pendidikan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.” (Wawancara tanggal 29 Maret 2018)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H. yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 6 juga menyatakan bahwa :

“Sangat penting sekali konstituen memahami hak, kewajiban, dan tanggungjawabnya sebagai warga negara dan memahami fungsinya mereka berjuang didalam politik. Seseorang itu bisa bergerak luar biasa itu kalau keyakinannya atau dalam konstruksi politik kami itu akidahnya itu yakin. Kalau dia yakin dengan apa yang diakukannya maka akan menjadi sesuatu yang hebat. Agar orang itu yakin, agar orang itu tahu, agar orang itu paham maka harus dilakukan pendidikan politik kan.” (Wawancara tanggal 5 April 2018)

Keempat, pendidikan politik yang diberikan oleh anggota dewan kepada konstituen penting dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang upaya yang dapat dilakukan dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh konstituen demi terwujudnya kebaikan bersama. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari H. Muzammil Syafii, S.H., M.Si. yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 2 mengatakan bahwa :

“Pendidikan politik penting untuk mencapai suatu kebaikan bersama dalam masyarakat. Misalnya banyak orang-orang yang meminta kepada kita untuk di advokasi misalnya pengaduan tentang banjir. Saya berikan penjelasan jika ada masalah begini maka selesaikan disini. Jika ingin menyelesaikan masalah hukum maka kamu kesini, kalau masalah politik kamu kesini. Nah itu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik. Sehingga masyarakat tidak buntu dalam menyalurkan aspirasinya atau menyelesaikan masalah mereka.” (Wawancara tanggal 29 Maret 2018)

Kelima, pendidikan politik diberikan kepada konstituen dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi dan tugas dari seorang wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur. Pemahaman tersebut sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat atau konstituen karena pada kenyataannya masyarakat atau konstituen kurang mengerti dan bahkan tidak mengetahui tugas dari seorang anggota dewan maupun fungsi dari lembaga legislatif terutama lembaga legislatif daerah.

Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan Pranaya Yudha Mahardhika, S.P., M.I.B. yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 3 yang mengungkapkan bahwa :

“Jadi yang pertama kita selalu dalam berbagai kesempatan bertemu dengan konstituen itu kan misalnya ketika melaksanakan kunjungan dapa, baik dalam rangka kunjungan kerja maupun reses. Nah, kesempatan dalam rangka bertemu dengan konstituen itu maka kita lakukan pendidikan politik Apa pendidikan politik? Ya yang saya tekankan adalah mengenai tupoksi. Jadi kita bicara tentang tupoksi anggota DPRD khususnya kami yang ada di Provinsi. Banyak masyarakat sering dengar anggota DPRD itu kerjanya ya mungkin gak terlalu banyak yang mereka tahu kan. Jadi ya kita terangkan itu.” (Wawancara 29 Maret 2018)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Dr. H. M. Noer Soetjipto, S.P., S.E., M.M. selaku anggota komisi B dari Partai Gerindra yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 7 menyatakan bahwa :

“Untuk lebih mendewasakan masyarakat agar masyarakat paham betul tentang dunia politik. Masyarakat kadang tidak paham dengan apa yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif. Apalagi DPRD. Saya sebagai seorang anggota dewan maka kewajiban saya untuk memahamkan masyarakat saya tentang apa sih fungsi dari lembaga legislatif itu.” (Wawancara tanggal 2 April 2018)

Aktivitas Pendidikan Politik yang Dilakukan oleh Anggota Dewan terhadap Konstituen

Dalam penelitian ini, aktivitas pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota dewan terhadap konstituen ditinjau dari dua hal yaitu bentuk aktivitas politik dan pelaksanaan pendidikan politik. Berikut merupakan tabel bentuk aktivitas pendidikan politik anggota dewan yaitu :

Tabel 3. Bentuk aktivitas Pendidikan Politik

No	Bentuk aktivitas Pendidikan Politik
1.	Hearing dengan konstituen
2.	Pelatihan kegiatan politik

3.	Pengkajian
4.	Sosialisasi Peraturan Daerah
5.	Seminar

Bentuk aktivitas pendidikan politik yang pertama Pertama adalah *hearing* dengan konstituen. Aktivitas pendidikan politik yang sering dilakukan oleh anggota dewan dalam rangka memberikan pendidikan politik bagi konstituen adalah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan konstituen. Pertemuan dengan konstituen di daerah pemilihan dilakukan dengan tujuan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi oleh konstituennya dan memperoleh solusi dari masalah tersebut. Pernyataan tersebut didukung oleh Dr. H. M. Noer Soetjipto, S.P., S.E., M.M. yang berasal dari partai Gerindra menyatakan bahwa :

“Tergantung kebutuhan pada masyarakat.

Contohnya saja mengadakan suatu pertemuan-pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat. Saya mendengarkan apa yang jadi masalah mereka lalu kita diskusikan apa solusinya.” (Wawancara tanggal 2 April 2018)

Pendapat tersebut juga didukung oleh Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H. yang berasal dari partai PAN terkait dengan aktivitas atau kegiatannya dalam memberikan pendidikan politik terhadap konstituennya mengatakan bahwa:

“Ceramah terus kemudian dialog, melakukan pertemuan-pertemuan, memberikan pelatihan untuk kader, memberikan pelatihan untuk masyarakat saya misalnya yang kemarin itu *Energy Building*.” (Wawancara tanggal 5 April 2018)

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan kepada Bapak Basuki saat melaksanakan aktivitas politik pada tanggal 7 April 2018 di Kabupaten Kediri beliau melakukan kegiatan kunjungan daerah pemilihan di desa Tenggerlor. Disana beliau mengadakan pertemuan dengan agenda mendengarkan apa yang menjadi permasalahan masyarakat yang terdiri atas ketua RT dan RW.

Kedua, pelatihan kegiatan politik. Aktivitas pendidikan politik juga dapat berupa melaksanakan pelatihan dalam ikut serta kegiatan politik misalnya pelatihan tentang melakukan survei elektabilitas suatu calon Presiden tahun 2019.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, Bapak Noer Tjahjo yang berkunjung kedaerah pemilihannya pada tanggal 31 Maret 2018 di Ngawi untuk menjadi narasumber dalam acara Bimtek para simpatisan yang terdiri atas bapak-bapak dan ibu-ibu perwakilan masing-masing desa di Kabupaten Ngawi, dan kader partai Gerindra dalam memenangkan Prabowo sebagai Calon Presiden 2019 di pemilihan umum Presiden tahun 2019. Acara tersebut diselenggarakan di gedung pertemuan rumah makan Duta II yang berada di jalan Raya Solo KM

5, Watualang, Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.

Dalam pertemuan yang di mulai pada pukul 12 siang itu Bapak Noer beserta para pemateri lainnya menjelaskan cara melakukan survey terkait elektabilitas Prabowo di Kabupaten Ngawi. Pada acara tersebut, anggota dewan tersebut selalu mengingatkan para simpatisan dan kader Gerindra untuk membantu memenangkan Prabowo sebagai calon Presiden Indonesia tahun 2019 untuk memajukan Indonesia. Itu merupakan salah satu wujud kegiatan pendidikan politik yang dilakukan.

Ketiga, pengkajian. Selain itu, kegiatan atau aktivitas pendidikan politik juga dilakukan dengan mengisi pengkajian-pengkajian di daerah pemilihan. Dalam pengkajian tersebut juga diselingi dengan adanya pendidikan politik. Seperti yang dikatakan oleh H. Muzammil Syafii, S.H., M.Si. yang berasal dari partai Nasdem yang mengatakan bahwa :

“Ya tatap muka. Kemudian saya menerangkan kemudian tanya jawab. Ya hampir seperti seminar gitu, mbak. Ya selain itu kita adakan pertemuan-pertemuan misalkan dengan kelompok-kelompok masyarakat dan juga yang saya bilang tadi yaitu di pengkajian-pengkajian. Itulah kegiatan yang saya lakukan dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap konstituen saya.” (Wawancara tanggal 29 Maret 2018)

Keempat, sosialisasi Peraturan Daerah. Sosialisasi Perda (Peraturan Daerah) yang dilakukan oleh anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur bertujuan bersama agar masyarakat atau konstituen tahu apa yang telah diperjuangkan dan dihasilkan oleh wakil rakyat dalam rangka menciptakan suatu kebaikan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Pendapat tersebut didukung Pranaya Yudha Mahardhika, S.P., M.I.B. yang berasal partai Golkar menyatakan bahwa :

“Pertemuan -pertemuan dengan konstituen, tokoh agama, tokoh masyarakat, workshop untuk sosialisasi perda. Nah ini mbak yang penting. Banyak masyarakat yang tidak tahu produk apa yang dihasilkan oleh kami yang ada di DPRD. Jadi, sosialisasi Perda ini penting untuk dilakukan agar masyarakat tahu peraturan daerah apa saja yang sudah dihasilkan dan apa saja manfaatnya.” (Wawancara tanggal 29 Maret 2018)

Kelima, seminar. Aktivitas pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota dewan juga lebih banyak dalam bentuk seminar. Biasanya seorang anggota dewan akan diundang menjadi salah satu narasumber dalam suatu seminar. Seminar sangat efektif dalam melaksanakan pendidikan politik karena dalam seminar yang dilakukan

akan terjadi interaksi yang cukup intens antara anggota dewan dengan peserta seminar. Sehingga mudah untuk memberikan pendidikan politik bagi peserta seminar.

Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan dari Agatha Retnosari, S.T. selaku anggota komisi E dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 1 mengungkapkan bahwa :

“Lebih banyak bentuknya seminar. Dalam seminar itu kan kita banyak berinteraksi dengan konstituen kita bisa berdiskusi dan saya sisipkan materi tentang pendidikan politik. Pernah saya diundang untuk mengisi sebagai narasumber dalam acaranya KPK dan sasarannya itu untuk anak SMA dan anak kuliah waktu itu. Acaranya itu di Surabaya mensimulasikan teknik loby. Ya awalnya saya memberikan materi selanjutnya mereka melakukan simulasi. Mengajarkan teknik loby ini penting karena politik itu kan mempertemukan kepentingan-kepentingan nah mereka diajarkan cara melakukan loby.” (Wawancara tanggal 2 April 2018)

Selanjutnya, pelaksanaan aktivitas pendidikan politik yang pertama adalah secara terprogram atau terencana. Berikut merupakan tabel pelaksanaan pendidikan politik anggota dewan yaitu:

Tabel 4. Pelaksanaan Pendidikan Politik

Pelaksanaan Pendidikan Politik	
Terencana/Terprogram	Spontanitas
Reses (tiga kali dalam setahun)	Kapanpun dan dimanapun bertemu dengan konstituen maka akan diberikan pendidikan politik
Kunjungan daerah pemilihan (enam kali dalam setahun)	
Pertemuan yang difasilitasi Negara	

Pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap konstituennya di daerah pemilihan masing-masing dilaksanakan secara terprogram atau terencana. Kegiatan pendidikan politik yang terprogram dilaksakan melalui adanya agenda reses, kunjungan daerah pemilihan, maupun pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh negara. Pendapat didukung oleh Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H. selaku anggota komisi D dari Partai PAN yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 6 yang mengatakan bahwa :

“Pasti terencana dan terprogram, dong mbak. Kalo saya punya serangkaian sarana untuk melalukan itu. Misalkan melalui pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh negara. Ada kegiatan seperti kunjungan ke daerah pemilihan, kami punya kegiatan reses, dan macem macem yang merupakan dialektika salah satunya adanya unsur pendidikan politik. Karena disana nantinya saya selalu memberikan penjelasan dan pemahaman

mengenai esensi dari perpolitikan di tanah air kepada konstituen.” (Wawancara tanggal 5 April 2018)

Pendapat tersebut juga didukung oleh Dr. H. M. Noer Soetjipto, S.P., S.E., M.M. selaku anggota komisi B dari Partai Gerindra yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 7 mengungkapkan bahwa :

“Pada waktu reses setahun tiga kali. Lalu ada kunjungan daerah pemilihan dua bulan sekali. Cukup banyak kita lakukan itu.” (Wawancara tanggal 2 April)

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh H. Muzammil Syafii, S.H., M.Si. selaku anggota Komisi A dari Partai Nasdem yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 2 yang mengungkapkan bahwa :

“Seharusnya kita tidak ada batas waktu, ya. Cuma kita punya pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor maka tiap empat bulan sekali kita melakukan pendidikan politik itu. Belum lagi kunjungan dapil setahun enam kali. Ya hampir tiap bulan saya bertemu konstituen saya. Pokoknya saya melakukan ketika reses, kunjungan dapil, dan ketika ada pengaduan masyarakat. Itu saja.” (Wawancara tanggal 29 Maret 2018)

Kedua, secara spontanitas. Selain aktivitas pendidikan politik dilaksanakan terprogram yaitu pada saat reses dan kunjungan daerah pemilihan, aktivitas pendidikan politik ada juga yang dilakukan secara spontanitas yaitu berupa aktivitas pertemuan dengan masyarakat terkait dengan adanya pengaduan dari masyarakat. Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan dari H. Muzammil Syafii, S.H., M.Si. selaku anggota Komisi A dari Partai Nasdem yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 2 yang mengatakan bahwa :

“Ada yang terprogram ada yang spontanitas. Kalo yang reses dan kunjungan daerah pemilihan itu terprogram tapi kalau yang pengaduan masyarakat itu spontanitas.” (Wawancara tanggal 29 Maret 2018)

Aktivitas pendidikan politik yang dilakukan oleh Bapak Muzammil pelaksanaannya ada yang terprogram akan tetapi ada juga yang spontanitas. Pendidikan politik yang terprogram atau terencana dilakukan ketika melaksanakan reses maupun kunjungan daerah pemilihan. Sedangkan yang bersifat spontanitas ketika adanya pengaduan masyarakat.

Pendidikan politik juga diberikan kepada masyarakat setiap ada kesempatan. Pendidikan politik hendaknya diberikan kepada konstituen kapanpun dan dimanapun. Anggota dewan merupakan seorang politisi sehingga memiliki tugas untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kapanpun dan dimanapun bertemu dengan masyarakat maka memberikan edukasi mengenai politik baik yang terprogram maupun yang tidak terprogram. Jadi setiap bertemu dengan siapapun

maka komunikasi yang terjadi seringkali berhubungan dengan politik. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Pranaya Yudha Mahardhika, S.P., M.I.B. dari partai Golkar yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 3 menyatakan bahwa :

“Setiap kali ada kesempatan saya selalu memberikan pendidikan politik bagi konstituen saya. Setiap saya bertemu dengan konstituen saya maka harus saya sisipi pendidikan politik.” (Wawancara tanggal 29 Maret 2018)

Pendapat tersebut juga diperkuat dengan pendapat dari Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H. selaku anggota komisi D dari Partai PAN yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 6 yang mengatakan bahwa :

“Sebagai seorang politisi pasti bernafaskan politik. Dimanapun saya bertemu orang maka saya memberikan pendidikan politik. Dimanapun saya bertemu masyarakat maka ya memberikan edukasi mengenai politik. Prinsipnya saya adalah makhluk politik jadi setiap bertemu dengan siapapun dialektika seringkali berhubungan dengan politik.” (Wawancara tanggal 5 April 2018)

Materi Pendidikan Politik yang Diberikan oleh Anggota Dewan terhadap Konstituen

Dalam melaksanakan pendidikan politik maka ada materi yang diberikan kepada masyarakat agar wawasan tentang politik semakin luas dan pemahamannya semakin meningkat. Materi pendidikan politik yang disampaikan kepada konstituen oleh anggota dewan di daerah pemilihan bermacam-macam. Dalam penelitian ini, materi pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota dewan terhadap konstituen ditinjau dari dua hal yaitu isi materi pendidikan politik dan media untuk menyampaikan materi pendidikan politik. Berikut merupakan tabel materi pendidikan politik yang diberikan anggota dewan yaitu :

Tabel 5. Materi Pendidikan Politik

No	Materi Pendidikan Politik
1.	Tugas pokok dan fungsi DPRD
2.	Sosialisasi calon Gubernur Jawa Timur
3.	Partai politik
4.	Upaya mewujudkan kebaikan bersama
5.	Empat Konsensus Kebangsaan
6.	Esensi politik
7.	Pentingnya aspirasi politik
8.	Nasionalisme kebangsaan

Materi pendidikan politik yang pertama adalah tugas pokok dan fungsi Lembaga Daerah (DPRD) dan pengenalan calon Gubernur Jawa Timur. Materi pendidikan politik yang diberikan yaitu mengenai tugas pokok dan fungsi dari lembaga daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur serta tugas pokok dan fungsi dari seorang anggota dewan.

Selain itu dalam bertemu dengan masyarakat, memberikan materi tentang upaya yang dilakukan untuk mencari kekuasaan dalam masyarakat yaitu dalam menyongsong pemilihan Gubernur tahun 2018 maka diberikan pengetahuan dan pemahaman kepada konstituen tentang calon yang sedang bertarung dalam pemilihan Gubernur dan apa kelebihan dari calon tersebut. Pendapat tersebut seperti yang dikatakan oleh Pranaya Yudha Mahardhika, S.P., M.I.B. dari Komisi B yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 3 terkait dengan materi pendidikan politik yang diberikan kepada konstituen mengungkapkan bahwa :

“Tupoksi anggota DPRD Jatim, pemberian wawasan tentang pembagian wilayah kerja dewan. Karena kita kan kerja di DPRD Provinsi salah satu dasarnya kan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Disitu ada pembagian wilayah kerja. Misalnya wilayah perhutanan, wilayah pertambangan itu kan kewenangannya ada di wilayah Provinsi, SMA di Provinsi, SD/SMP di Kabupaten/kota. Lalu Perda yang sudah dihasilkan. Nah itu juga kita terangkan. Ya kalau menjelang Pilgub seperti sekarang ini saya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Golkar mendukung Khofifah-Emil. Saya memberikan pencerahan kepada mereka kenapa mereka perlu mendukung dan memilih Khofifah-Emil.” (Wawancara 29 Maret 2018)

Kedua, partai politik dan upaya mewujudkan kebaikan bersama. Materi pendidikan politik yang diberikan oleh anggota dewan kepada konstituen yaitu tentang partai politik beserta fungsinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tugas dari seorang anggota dewan yang duduk di lembaga legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama dalam hal ini, disampaikan upaya yang dapat dilakukan oleh konstituen untuk mengutarakan masalahnya aspirasinya kepada anggota dewan dan upaya untuk menyelesaikan masalah atau mewujudkan aspirasi tersebut. Pendapat tersebut seperti yang diungkapkan oleh H. Muzammil Syafii, S.H., M.Si. dari komisi A yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 2 terkait dengan materi pendidikan politik menyampaikan bahwa :

“Kita terangkan dulu fungsi partai politik, fungsi dari anggota DPRD, kemudian apa pekerjaan DPRD, bagaimana apabila ada masalah dalam menyalurkan aspirasinya itu.” (Wawancara tanggal 29 Maret 2018)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Dr. H. M. Noer Soetjipto, S.P., S.E., M.M. selaku anggota komisi B dari Partai Gerindra yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 7 mengungkapkan bahwa :

“Materi saya berikan sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat. Ketika proses dialog terjadi maka saya berikan pemahaman politik bagi masyarakat misalnya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh konstituen saya. “ (Wawancara tanggal 2 April)

Ketiga, empat konsensus kebangsaan. Materi pendidikan politik yang diberikan oleh seorang anggota dewan kepada konstituen adalah pengetahuan tentang empat konsensus kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Agatha Retnosari, S.T. dari komisi E yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 1 menyatakan bahwa :

“Yang lebih sering sih Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.” (Wawancara tanggal 2 April 2018)

Keempat, esensi politik, pentingnya aspirasi politik, dan nasionalisme kebangsaan. Dalam memberikan pendidikan politik, maka penting untuk memberikan materi yang berisi tentang esensi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pentingnya aspirasi politik dalam rangka mencapai kebaikan bersama, dan pentingnya membangun nasionalisme kebangsaan, pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendapat tersebut seperti yang dikatakan oleh Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H. dari Komisi D yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 6 yang menyatakan bahwa :

“Esensi kehidupan politik, pentingnya dunia politik untuk kehidupan dalam kebangsaan, pentingnya membangun nasionalisme kebangsaan kita, pentingnya menjaga keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara, pentingnya aspirasi politik, apa makna politik.” (Wawancara tanggal 5 April 2018)

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 7 April 2018 di Kediri terhadap bapak Basuki Babussalam, diketahui bahwa setiap bertemu dengan konstituennya maka yang selalu disinggung atau materi yang sampaikan beliau adalah tentang esensi politik. Bapak Basuki selalu mengatakan kepada konstituennya dalam pertemuan di Pare dan di desa Tenggerlor bahwa masyarakat harus mampu menguasai politik dengan baik. Masyarakat diharuskan oleh beliau untuk ikut berpartisipasi bergerak dalam politik apapun bentuknya. Bapak Basuki juga menjelaskan esensi politik bagi kehidupan masyarakat khususnya bagi konstituennya sehingga beliau mengungkapkan bahwa tidak ada alasan bagi konstituennya untuk buta terhadap politik.

Supaya materi pendidikan politik dapat disampaikan kepada konstituen maka dibutuhkan media. Berikut merupakan bagan media yang digunakan anggota dewan dalam memberikan pendidikan politik kepada konstituen yaitu :

Tabel 6. Media Pelaksanaan Pendidikan Politik

No	Media yang digunakan
1.	LCD
2.	Slide Powerpoint yang berisi materi pendidikan politik
3.	Film tentang politik
4.	Video tentang politik
5.	Media Cetak (Majalah DPRD, Pamflet Partai Politik)
6.	Media Online yang meliputi (Facebook, Twitter, Instagram)

Media yang digunakan untuk menyampaikan materi pendidikan politik diantaranya adalah LCD dan *Slide Powerpoint*. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Dr. H. M. Noer Soetjipto, S.P., S.E., M.M. yang berasal dari fraksi Gerindra mengatakan bahwa :

“Biasanya saya siapkan powerpoint mbak biar mudah. Saya siapkan LCD. Kadang hanya pakai pengeras suara. Tidak pakai powerpoint begitu. Ya tergantung situasi lah, mbak.” (Wawancara 2 April 2018)

Selain itu, media yang digunakan juga berupa film, video, media cetak dan media sosial. Media sosial contohnya seperti *twitter*, *facebook*, dan *instagram* dimana anggota dewan menulis maupun membagikan hal-hal tentang politik di media sosial. Sedangkan media cetak yaitu majalah DPRD Provinsi Jawa Timur yang berisi tentang kinerja dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur agar masyarakat tahu bagaimana kinerja dari seorang anggota dewan. Pendapat tersebut seperti pernyataan H. Muzammil Syafii, S.H., M.Si. yang berasal dari fraksi Nasdem Hanura menyatakan bahwa :

“Ya pakai pengeras suara, LCD, laptop. Saya juga sering mengupload tulisan saya di media sosial contohnya *instagram*. Kadang juga saya membagikan majalah DPRD Provinsi Jawa Timur kepada konstituen saya agar masyarakat tahu bagaimana sih kerja di DPRD melalui majalah itu.” (Wawancara 29 Maret 2018)

Pernyataan tersebut juga didukung Agatha Retnosari, S.T. yang berasal dari fraksi PDIP menyatakan bahwa :

“Film itu paling sering, video ya. Terus kemudian gambar, slide power point. Oh ya kamu lihat mbak media sosial saya seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram* juga. Disana saya mengunggah tulisan-tulisan terkait politik dan juga membagikan kegiatan saya menjadi

seorang anggota dewan.” (Wawancara 2 April 2018)

Selanjutnya, terkait dengan media yang digunakan anggota dewan dalam menyampaikan pendidikan politik, Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H. yang berasal dari fraksi PAN mengungkapkan bahwa :

“Banyak. Ya misalnya saya memakai power point, saya berikan hardcopy materi. Dan yang tidak pernah saya lupakan untuk di bawa adalah *I pad* saya ini. Disini banyak sekali materi-materi pendidikan politik yang saya berikan baik kepada kader maupun masyarakat saya. Saya tinggal klik selesai. Ini misalnya saya kemarin malam memberikan materi tentang marketing politik maka saya tinggal klik ini saja.” (Wawancara tanggal 5 April 2018)

Tidak hanya ditampilkan saja materi pendidikan politik dalam *slide powerpoint* agar dilihat oleh konstituen, akan tetapi juga diberikan *hard copy* nya juga agar masyarakat dapat membacanya. Tidak hanya itu, Bapak Basuki juga menggunakan media pamflet yang berisi tentang makna politik serta pentingnya politik dalam kehidupan yang di cetak oleh Partai PAN yang dibagikan kepada konstituen di desa tersebut. (Observasi tanggal 7 April 2018)

Metode dan Teknik yang Digunakan oleh Anggota Dewan dalam Memberikan Pendidikan Politik terhadap Konstituen

Dalam memberikan pendidikan politik bagi konstituen agar mampu diserap dengan mudah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat diperlukan metode dan teknik. Berikut merupakan tabel tentang metode dan teknik yang digunakan dalam memberikan pendidikan politik yaitu :

Tabel 7. Metode dan Teknik Pendidikan Politik

Metode	Teknik
Metode Pembelajaran Secara Kelompok	Ceramah
	Tanya Jawab
	Diskusi

Pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam penyampaian menggunakan suatu metode yaitu metode pembelajaran secara kelompok karena pada dasarnya anggota dewan bertugas untuk melakukan *hearing* dengan masyarakat secara rutin. Ketika bertemu dengan konstituen, maka akan dilaksanakan suatu pertemuan. Pada pertemuan tersebut akan dilaksanakan diskusi secara kelompok antara anggota dewan dengan

konstituen. Berdasarkan hal tersebut, H. Muzammil Syafii, S.H., M.Si. dari komisi A yang berasal dari fraksi Nasdem Hanura terkait dengan metode yang digunakan dalam memberikan pendidikan politik terhadap konstituennya menyatakan bahwa:

“Kalau saya rasa saya sering memakai metode diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat. Masyarakat saya kumpulkan lalu kita adakan pertemuan.” (Wawancara tanggal 29 Maret 2018)

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Pranaya Yudha Mahardhika, S.P., M.I.B. dari komisi B yang berasal dari fraksi Golkar terkait dengan metode yang digunakan dalam memberikan pendidikan politik terhadap konstituennya mengatakan bahwa :

“Biasanya ya kita adakan diskusi secara kelompok.” (Wawancara 29 Maret 2018)

Teknik yang digunakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap konstituen yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab karena teknik tersebut sangat mudah diterapkan antara anggota dewan dengan konstituen sehingga sering untuk dilakukan. Terkait dengan hal tersebut, H. Muzammil Syafii, S.H., M.Si. dari komisi A yang berasal dari fraksi Nasdem Hanura terkait dengan teknik yang digunakan dalam memberikan pendidikan politik terhadap konstituennya mengatakan bahwa:

“Yang saya lakukan saya memberikan ceramah atau materi kepada kontituen saya, lalu ada sesi untuk tanya jawab, mereka menyatakan masalahnya, apa kesulitan mereka, saling berdiskusi. Ya seperti itu.” (Wawancara tanggal 29 Maret 2018)

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Pranaya Yudha Mahardhika, S.P., M.I.B. dari komisi B yang berasal dari fraksi Golkar terkait dengan teknik yang digunakan dalam memberikan pendidikan politik terhadap konstituennya yang mengatakan bahwa :

“Ceramah, kasih materi, tanya jawab, diskusi. Lebih sering itu.” (Wawancara 29 Maret 2018)

Selanjutnya, terkait dengan teknik yang digunakan dalam memberikan pendidikan politik terhadap konstituennya Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H. dari komisi D yang berasal dari fraksi PAN menyatakan bahwa:

“Tekniknya misalkan ceramah terus nanti ada diskusi terus nantinya ada sesi untuk tanya jawab, tukar pikiran. Ya seperti itu.” (Wawancara tanggal 5 April 2018)

Pada kenyataannya, semua anggota dewan menganggap bahwa metode pembelajaran kelompok dengan teknik ceramah, tanya jawab dan diskusi sangat mampu dalam memberikan pendidikan politik bagi

konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Hal tersebut dikarenakan dengan digunakan metode dan teknik tersebut maka pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota dewan kepada konstituen menjadi efektif dan bermakna.

Kendala dalam Memberikan Pendidikan Politik yang Dilakukan oleh Anggota Dewan terhadap Konstituen

Dalam memberikan pendidikan politik terhadap konstituen di daerah pemilihan masing-masing, anggota dewan kadang menghadapi suatu kendala. Berikut merupakan bagan yang berisi kendala anggota dewan dalam memberikan pendidikan politik yaitu :

Tabel 8. Kendala dalam Memberikan Pendidikan Politik

No.	Kendala
1.	Pemahaman konstituen tentang politik yang berbeda-beda
2.	Keaktifan konstituen dalam diskusi
3.	Adanya penolakan
4.	Tidak ada kendala

Kendala yang pertama adalah, kendala tentang pemahaman politik yang berbeda-beda dan keaktifan dalam diskusi. Pada kenyataannya banyak masyarakat yang sebenarnya acuh atau tidak peduli dengan politik karena masyarakat beranggapan bahwa sebenarnya politik itu tidak berdampak bagi kehidupan masyarakat sendiri. Pemahaman yang salah tersebut harus dibenarkan oleh anggota dewan melalui pendidikan politik sehingga diharapkan masyarakat paham tentang makna politik yang sebenarnya dan tidak menerima pengetahuan tentang politik secara mentah atau hal-hal buruk saja terkait politik.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Dr. H. M. Noer Soetjipto, S.P., S.E., M.M. yang berasal dari fraksi Gerindra terkait dengan kendala yang dihadapi dalam memberikan pendidikan politik terhadap konstituen mengatakan bahwa :

“Kendalanya pemahaman masyarakat yang berbeda-beda. Belum lagi pemahaman masyarakat itu tergantung siapa yang memberikan pemahaman terkait politik. Banyak juga konstituen saya yang acuh sebenarnya terhadap politik karena mereka bilang pada saya begini “saya ndak tau politik pak, pokoknya saya oleh duit, bisa makan, beres.” Nah ini lah tugas saya dan tantangan saya dalam memahami konstituen saya agar mereka paham tentang politik sehingga politik tidak diterima secara mentah yaitu hanya buruknya saja. Selain itu, misalnya yang datang 100 nah yang serius yang aktif itu cuma 10 mbak. Ya itu kendalanya.” (Wawancara tanggal 2 April 2018)

Kedua, kendala adanya penolakan. Dalam memberikan pendidikan politik misalnya materi tentang

pentingnya politik, pernah terjadi penolakan yaitu berupa penyanggahan dari masyarakat. Banyak masyarakat memiliki anggapan bahwa sesungguhnya politik kotor dan mengerikan. Seperti yang dikatakan oleh Agatha Retnosari, S.T. terkait dengan kendala yang dihadapi dalam memberikan pendidikan politik terhadap konstituen menyatakan bahwa :

“Ada. Kadang pernah terjadi penolakan. Ketika saya memberikan materi tentang pendidikan politik terkait dengan pentingnya kita berpolitik, banyak masyarakat yang menyanggah apa yang saya sampaikan. Karena mereka beranggapan bahwa politik itu apasih. Politik itu kotor, politik itu mengerikan. Jadi ya saya berusaha harus membongkar pemikiran itu sehingga saya bisa memberikan pendidikan politik yang baik bagi mereka. Pernah suatu ketika saya mengisi acara di UPN Surabaya. Mereka tidak setuju dengan apa yang saya utarakan mengenai memilih dalam pemilihan umum. Dan mereka mau golput dalam pemilu. Sehingga saya ajak mereka bermain game dan saya berikan pemahaman kepada mereka mengenai dampak dari golput yang dilakukan dan saya selalu tekankan bahwa golput adalah bukan keputusan yang bijaksana.” (Wawancara tanggal 2 April 2018)

Dengan adanya kejadian tersebut maka Ibu Agatha berusaha untuk mengubah pemikiran para mahasiswa yang memilih golput dalam pemilihan umum. Ibu Agatha memberikan pemahaman bahwa golput bukan merupakan keputusan yang bijaksana dan juga memberikan pemahaman tentang dampak dari golput yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan pendidikan politik juga terhadap konstituen terdapat anggota dewan yang tidak menemui suatu kendala atau kesulitan. Ketika memberikan pendidikan politik, maka tidak boleh mengatakan adanya sebuah kendala. Apapun keadaannya harus dihadapi karena merupakan suatu dinamika dan seharusnya dinikmati saja prosesnya. Kendala juga tidak ditemui karena pada kenyataannya konstituen di zaman sekarang lebih baik pengetahuannya dibandingkan dengan zaman dahulu. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H. yang mengungkapkan bahwa :

“Bagi seorang guru itu kan tidak boleh mengatakan ada sebuah kendala. Apapun adanya ya dihadapi. Saya tidak pernah menganggap adanya suatu persoalan ketika saya memberikan pendidikan politik. Bahkan saya dihadang ataupun diajak duel aja bukan merupakan sebuah kendala menurut saya itu sebuah dinamika, dinikmati saja, cari jalan lain.” (Wawancara tanggal 5 April 2018)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Pranaya Yudha Mahardhika, S.P., M.I.B. yang berasal dari partai Golkar juga mengatakan bahwa :

“Sejauh ini belum pernah saya menemui kendala dalam berinteraksi dengan konstituen saya apalagi terkait dengan pendidikan politik. Karena saya pikir sekarang ini sudah lumayan paham lah masyarakat dengan kegiatan politik. beda dengan jaman dulu.” (Wawancara 29 Maret 2018)

Pembahasan

Pendidikan politik merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar untuk menanamkan dan meningkatkan pemahaman tentang hak, kewajiban, serta tanggungjawab yang ada pada setiap warga negara yang diharapkan dapat menjadikan warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran politik. Proses pendidikan politik pun berlaku bagi orang-orang dewasa, bahkan proses tersebut sangat penting untuk dilakukan.

Seorang anggota dewan pada kenyataannya memiliki kesadaran bahwa wakil rakyat yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki suatu kewajiban untuk mencerdaskan konstituen dalam hal politik dengan memberikan pendidikan politik di daerah pemilihan mereka masing-masing karena mereka harus ikut serta dalam melaksanakan salah satu fungsi dari partai politik yaitu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Semua anggota dewan sepakat bahwa memberikan pendidikan politik kepada konstituen di daerah pemilihan masing adalah penting dan harus dilakukan dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat khususnya konstituen dalam hal politik.

Anggota dewan memiliki pandangan bahwa sesungguhnya politik merupakan sebuah bidang yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Selama manusia hidup maka akan membutuhkan politik disegala bidang kehidupan sampai manusia itu meninggal. Dengan adanya kenyataan bahwa politik selalu bersentuhan dengan masyarakat maka citra politik yang baik harus dibentuk.

Anggota dewan selalu berusaha untuk membangun citra politik yang baik dikalangan masyarakat secara langsung ketika bertemu dengan konstituen maupun melalui media sosial yang anggota dewan miliki. Kedua kegiatan tersebut penting dilakukan dengan tujuan agar masyarakat akan memiliki tingkat kepercayaan terhadap politik yang baik sehingga mereka akan peduli tentang dinamika politik yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendidikan politik yang diberikan oleh seorang anggota dewan terhadap konstituennya memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang

hak, kewajiban, dan tanggungjawabnya sebagai seorang warga negara. Tidak hanya itu, pendidikan politik penting untuk diberikan kepada konstituen agar konstituen itu tahu dan paham secara nyata tentang politik dan pada akhirnya pendidikan politik dapat memiliki kontribusi dalam kehidupan masyarakat sehingga akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik.

Selain itu, pendidikan politik yang dilaksanakan oleh anggota dewan terhadap konstituennya di daerah pemilihan masing-masing dapat mensosialisasikan upaya seorang warga negara dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi yang didampingi oleh anggota dewan sehingga diharapkan akan terwujud suatu kebaikan bersama dalam kehidupan masyarakat.

Yang terakhir, pendidikan politik dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada konstituen anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan tentang tugas dan fungsi dari seorang anggota dewan dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur karena pada kenyataannya citra dewan di masyarakat cukuplah buruk dengan menganggap bahwa tugas seorang anggota dewan sedikit dan tidak mempengaruhi kehidupan mereka. Pandangan yang salah tersebut harus diluruskan melalui pendidikan politik.

Dalam penelitian ini, peran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pendidikan politik terhadap konstituen dilihat dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan, materi yang diberikan, metode, dan teknik yang digunakan. Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh anggota dewan dalam memberikan pendidikan politik terhadap konstituen di daerah pemilihan adalah melakukan pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat dimana disana terjadi diskusi tentang masalah yang sedang dihadapi oleh konstituen yang di ungkapkan kepada anggota dewan sehingga nantinya akan ada penyelesaian, pelatihan survei tentang mengukur elektabilitas suatu calon Presiden tahun 2019, mengisi pengkajian yang di dalamnya terdapat unsur pendidikan politik, melaksanakan workshop sosialisasi Peraturan Daerah yang berfungsi untuk mengenalkan atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah yang sudah dihasilkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, mengadakan maupun menghadiri seminar yang merupakan kegiatan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait politik, dan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan sikap politik.

Sebagian besar waktu anggota dewan adalah untuk masyarakat. Setiap bertemu dengan masyarakat

dimanapun dan kapanpun maka seorang anggota dewan berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota dewan terhadap konstituen ada yang terprogram dan ada yang spontanitas. Kegiatan atau aktivitas pendidikan yang terprogram dilakukan pada saat reses maupun kunjungan kerja daerah pemilihan. Sedangkan pendidikan politik yang sifatnya spontanitas dilakukan pada pertemuan-pertemuan lain diluar reses dan kunjungan daerah pemilihan. Jadi, dalam memberikan pendidikan politik kepada konstituen dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.

Surbakti (2010:2) mengungkapkan bahwa terdapat lima pandangan mengenai politik yaitu politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama, politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, dan politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Bedasarkan pendapat dari Ramlan Surbakti tersebut maka dengan diberikannya materi pendidikan politik tersebut konstituen akan tahu dan paham tentang makna politik yang sebenarnya bahwa politik itu dapat dijadikan alat untuk mewujudkan kebaikan bersama, upaya yang dilakukan untuk mencari kekuasaan dalam masyarakat yaitu upaya untuk memenangkan calon Gubernur 2018, konstituen tahu tugas dan fungsi dari lembaga legislatif daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, konstituen tahu apa itu partai politik, konstituen paham empat konsensus kebangsaan yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, konstituen tahu bahwa politik itu berguna untuk dijadikan alat untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan akan tetapi dengan cara-cara yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, konstituen tahu cara menyampaikan aspirasi dan tahu pentingnya menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat.

Pendidikan politik yang diberikan oleh anggota dewan kepada konstituen agar mudah di serap maka dibutuhkan suatu metode dan teknik. Metode yang digunakan oleh anggota dewan dalam memberikan pendidikan politik kepada konstituen adalah metode pembelajaran kelompok (*group learning method*) dimana pendidikan politik diberikan dengan cara dikumpulkan dalam sebuah pertemuan dan dalam pertemuan itu dilakukan sebuah diskusi kelompok. Teknik yang digunakan dalam memberikan pendidikan politik

terhadap konstituen adalah ceramah yang berisi tentang materi pendidikan politik, selanjutnya dilakukan tanya jawab, dan berdiskusi.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap konstituen termasuk dalam pendidikan yang dilakukan terhadap orang dewasa. Pendidikan orang dewasa dikenal dengan istilah Andragogi. Andragogi dirumuskan sebagai suatu ilmu atau seni dalam membantu orang dewasa belajar (Arif, 1990:1). Pendidikan politik yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sudah mengimplementasikan Teori Andragogi dengan baik.

Pelaksanaan teori Andragogi terhadap pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota dewan kepada konstituen ditandai dengan adanya transfer ide antara anggota dewan dengan konstituen dan juga sebaliknya yaitu antara konstituen dengan anggota dewan.

Pendidikan politik yang diberikan oleh anggota dewan kepada konstituen kadang melibatkan konstituen dalam menciptakan suatu iklim belajar. Konstituen diikutsertakan atau dilibatkan dalam mendiagnosa kebutuhan belajar sesuai dalam teori andragogi, proses belajar mengajar adalah tanggungjawab bersama antara fasilitator yaitu anggota dewan dengan masyarakat agar dalam pelaksanaan pendidikan politik menjadi berkesan dan bermakna. Sehingga konstituen dapat mengevaluasi hasil belajarnya secara mandiri karena evaluasi belajar dalam proses belajar andragogi menekankan pada cara evaluasi diri sendiri. Ketika mampu mengevaluasi hasil belajar dengan baik maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang politik dan mampu meningkatkan kesadaran politik konstituen.

Dalam proses belajar orang dewasa, tidak bisa dipungkiri bahwa orang dewasa merupakan sumber belajar yang lebih kaya dalam hal pengalaman maka anggota dewan dalam memberikan pendidikan politik menggunakan teknik yang sifatnya menyadap pengalaman konstituen seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Diskusi yang dilakukan dalam proses pelaksanaan pendidikan politik dapat menarik konstituen dalam menyumbangkan pengalamannya kepada seluruh orang yang hadir dalam diskusi tersebut sehingga proses menanamkan pengetahuan dan pemahaman tentang politik menjadi lebih menyenangkan dan semua konstituen dapat terlibat aktif.

Pendidikan politik yang diberikan oleh anggota dewan harus dituntut mendorong kesiapan konstituen untuk belajar. Artinya bahwa, orang dewasa akan belajar apabila pembelajaran tersebut akan berdampak bagi kehidupan konstituen, dimana konstituen akan belajar jika mempelajari permasalahan yang sedang dihadapi dan

nantinya dari proses belajar tersebut akan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Pada dasarnya, pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota dewan berorientasi pada masalah yang sedang dihadapi oleh konstituennya dan dalam suatu diskusi yang ada maka akan dicari alternatif pemecahan masalah tersebut. Oleh karena orientasi belajar orang dewasa adalah memecahkan masalah maka anggota dewan memberikan suatu bantuan kepada para konstituen untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur tidak efektif dalam artian bahwa tidak benar-benar mencerdaskan masyarakat dalam hal politik dengan sebenar-benarnya. Dalam proses memberikan pendidikan politik seorang anggota dewan tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi konstituennya. Padahal anggota dewan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan *track record* politiknya juga baik akan tetapi tidak dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menciderai citra politik dalam masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa pendidikan politik yang sifatnya normatif dan aplikatif tidak dilaksanakan secara beriringan.

Dalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat, anggota dewan akan memberikan sejumlah uang kepada konstituen sebagai suatu penghargaan atas kesediaannya hadir dalam acara yang telah dilakukan oleh anggota dewan. Maka keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya sebenarnya didorong karena adanya uang yang diberikan oleh para anggota dewan tersebut bukan karena kesadaran dari masing-masing masyarakat bahwa aspirasi itu penting untuk di sampaikan kepada anggota dewan. Wakil rakyat menganggap bahwa uang yang diberikan adalah wajar. Konstituen yang hadirpun hanya berorientasi pada uang yang didapatkan dari anggota dewan. *Money Politic* pada kenyatannya dapat menciderai adanya sistem demokrasi. Meskipun semua tokoh politik tahu bahwa hal tersebut tidak dibenarkan akan tetapi tetap dilakukan dan pada akhirnya konstituen pun menganggap uang yang diberikan oleh anggota dewan adalah sesuatu yang wajar dan bukan merupakan masalah.

Anggota dewan menganggap bahwa penting sekali untuk menjadi seorang wakil rakyat karena dengan begitu, mereka punya suatu tabungan apabila mereka mereka ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah pemilihan atau kepentingan-kepentingan lain yang menyangkut partai politik dalam hal meraih kekuasaan.

Pada keadaan yang sebenarnya, seorang anggota dewan selain memiliki peran sebagai seorang legislator daerah, juga memiliki peran sebagai anggota dari partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang wakil rakyat, kenyataannya anggota dewan tidak dapat

melepaskan diri dari kepentingan partai. Seharusnya ketika menjadi seorang wakil rakyat maka yang didahulukan adalah kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi atau kepentingan partai politik. Karena kunjungan daerah pemilihan tidak murni di dasari kepentingan antara wakil rakyat dan terwakil yaitu konstituen akan tetapi adanya kepentingan lain. Misalnya melakukan konsolidasi politik dengan mengajak konstituen untuk menandatangani kontrak politik yang berisi tentang janji politik yang akan diwujudkan apabila seorang dewan mampu terpilih menjadi kepala daerah di daerah pemilihan.

Hal tersebut dengan jelas menandakan bahwa sebenarnya rakyat hanya dijadikan sebagai objek politik. Artinya bahwa dalam proses politik, masyarakat dibutuhkan untuk dalam hal pemilihan umum saja. Konstituen tidak dilibatkan dalam memilih suatu calon atau hal lainnya terkait dengan keputusan politik. Segala janji politik diutarakan kepada konstituen dengan tujuan untuk menggiring para konstituen ke bilik-bilik suara di pemilihan umum nantinya.

Ketika perhelatan pemilihan umum maka tokoh-tokoh politik gencar untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang apapun yang berhubungan dengan proses pemilihan umum. Akan tetapi setelah pemilihan umum, pendidikan politik diabaikan. Padahal pendidikan politik seharusnya dilakukan secara berjenjang mulai dari memberikan pengetahuan politik sehingga nantinya akan menumbuhkan sikap politik, dan meningkatkan partisipasi politik tidak hanya dalam mengikuti pemilu saja akan tetapi menumbuhkan dan meningkatkan suatu kesadaran politik yang pada akhirnya masyarakat sadar bahwa keterlibatan dirinya dalam politik itu penting.

Seperti yang diungkapkan oleh Milbiath (2001:143) yang mengatakan bahwa kesadaran politik atau keinsyafan hidup bernegara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat maka tugas-tugas negara banyak yang terbengkalai. Warga negara baik secara individu maupun kelompok diharapkan memiliki kesadaran untuk turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan politik. Akan tetapi kenyataannya bahwa konstituen beranggapan bahwa ketika dia memilih suatu kandidat atau calon kepala daerah maka konstituen sudah berpartisipasi penuh secara politik. Padahal tidak demikian karena partisipasi dalam politik banyak sekali macamnya sehingga kesadaran politik yang dimiliki oleh konstituen tidak terbentuk dengan baik.

Pada kenyatannya, konstituen bukan diberikan pendidikan politik yang bertujuan untuk mencerdaskan konstituen tentang politik secara murni akan tetapi lebih mengarah kepada memberikan indoktrinasi politik. Indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika

penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik (Surbakti, 2010:150).

Para anggota dewan lebih banyak memberikan suatu pemahaman tentang ideologi atau pemahaman yang dianut yaitu ideologi partai politik anggota dewan berasal. Untuk mendapatkan suatu kekuasaan dalam masyarakat maka anggota dewan memberikan doktrin bahwa masyarakat harus percaya dengan apa yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh partai politik. Tugas masyarakat hanyalah mendukung dan percaya terhadap janji yang dinyatakan oleh orang-orang yang menginginkan kekuasaan. Dengan dilaksanakannya indoktrinasi politik tersebut maka kesadaran politik yang dimiliki oleh seorang konstituen tidak akan bisa tumbuh dan meningkat dengan baik karena masyarakat menganggap bahwa dengan kita mendukung suatu calon atas dasar janji dan memilihnya maka masyarakat sudah ikut serta dalam kegiatan politik.

Kesadaran politik yang dimiliki oleh setiap warga negara diperlukan untuk menjadikan warga negara sebagai masyarakat modern dalam politik. Howlett dan Ramesh (dalam Koirudin, 2004: 67) mengungkapkan bahwa masyarakat modern adalah masyarakat yang tidak memandang politik hanya sebagai ikatan ideologis dan keyakinan semata akan tetapi juga melihat politik sebagai aktualisasi dan kepentingan mereka yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik

Pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi suatu cara dalam mengidentifikasi kualitas dari seorang wakil rakyat yang berada di DPRD. Masyarakat yang memiliki suatu kesadaran politik akan membentuk masyarakat modern yang semakin cerdas dan memiliki pengetahuan serta pemahaman luas karena adanya akses informasi yang juga luas sehingga masyarakat tidak lagi dapat dipandang atau dijadikan sebagai suatu objek politik para pemangku kepentingan. Masyarakat modern adalah masyarakat yang benar-benar tahu dan memahami arti partisipasi mereka dalam proses politik. Sehingga sudah seharusnya masyarakat dididik untuk menjadi manusia modern dalam hal politik melalui pendidikan politik yang seharusnya dilakukan oleh anggota dewan karena para wakil rakyat memiliki suatu peran dalam melaksanakan pendidikan politik.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut : pertama, pandangan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tentang pendidikan politik yaitu pendidikan politik merupakan

salah satu tanggung jawab seorang anggota dewan pendidikan politik diberikan untuk menciptakan citra politik yang baik di masyarakat, pendidikan politik penting dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman secara konkret tentang politik, pendidikan politik bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada konstituen dalam menyelesaikan permasalahan demi terwujudnya kebaikan bersama, dan pendidikan politik bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada konstituen tentang fungsi dan tugas DPRD.

Kedua, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh anggota dewan dalam memberikan pendidikan politik terhadap konstituen di daerah pemilihan adalah *hearing* dengan konstituen, pelatihan kegiatan politik, pengkajian, sosialisasi Peraturan Daerah, dan seminar.

Ketiga, materi pendidikan politik yang diberikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur kepada konstituen di daerah pemilihan adalah tugas pokok dan fungsi dari DPRD Provinsi Jawa Timur, sosialisasi pemilihan Gubernur Jawa Timur, fungsi partai politik, upaya mewujudkan kebaikan bersama, empat konsensus kebangsaan, pentingnya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nasionalisme kebangsaan, dan pentingnya aspirasi politik.

Keempat, metode yang digunakan oleh anggota dewan dalam memberikan pendidikan politik kepada konstituen adalah metode pembelajaran kelompok dan teknik yang digunakan dalam memberikan pendidikan politik terhadap konstituen adalah ceramah, tanya jawab, dan berdiskusi.

Kelima, kendala yang ditemui oleh anggota dewan dalam memberikan pendidikan politik adalah pemahaman tentang politik oleh masing-masing konstituen berbeda-beda, hanya beberapa saja dari konstituen yang aktif dalam melaksanakan diskusi, adanya penolakan, dan tidak adanya kendala.

Saran

Pertama, anggota dewan hendaknya melaksanakan pendidikan politik secara keseluruhan dalam artian harus benar-benar mencerdaskan konstituen dalam hal politik sehingga akan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran politik dengan baik.

Kedua, anggota dewan hendaknya memberikan pendidikan politik kepada konstituen secara pribadi dengan tujuan untuk meningkatkan pengembangan diri dalam melaksanakan pendidikan politik.

Ketiga, anggota dewan hendaknya dalam melaksanakan pendidikan politik, konstituen tidak hanya disugahi oleh materi saja akan tetapi juga praktiknya misalnya pribadi dari anggota dewan yang dapat dijadikan contoh bagi konstituen sehingga apa yang

disampaikan anggota dewan tentang politik harus sejalan dengan apa yang dilakukan oleh anggota dewan dalam praktiknya.

Keempat, anggota dewan hendaknya memberikan pendidikan politik bagi konstituen secara terus menerus tidak hanya saat pemilu saja sehingga akan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran politik dari konstituen karena pada dasarnya pendidikan politik akan berjalan dengan baik jika dilaksanakan secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Zainudin. 1990. *Andragogi*. Bandung: Angkasa.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Cohen, Bruce. 2009. *Peranan, Sosilogi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ichwanudn, Wawan. 2012. *LIPI: Cuma 23 Persen Rakyat yang Tertarik Politik*. (Online). (<http://lipi.go.id/berita/single/LIPI-Cuma-23-persen-Rakyat-Yang-Tertarik-Politik/6919>), diakses tanggal 2 Desember 2017).
- Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandar Maju.
- Knowles, Malcolm. 1977. *The Modern Practice of Adult Education: Andragogy Versus Pedagogy*. New York: Association Press
- Milbiath. 2001. *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Tanjung, Agib. 2013. *Survei: Masyarakat Makin Apatitis terhadap Politik*. (Online). (<http://m.merdeka.com/politik/survei-masyarakat-makin-apatitis-terhadap-politik.html?>), diakses tanggal 2 Desember 2017)
- Wikipedia. 2014. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. (Online). (http://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Provinsi_Jawa_Timur/), diakses tanggal 4 Desember 2017).